



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pendidikan, Kecamatan No. 0 R.D.U. INK. Kabupaten Banjar
Telp. 0511-4772570 Fax. 0511-4772221

BANJARBARU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	18
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	18
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	24
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi.....	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.....	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
BAB VII KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	62
BAB VIII PENUTUP.....	67

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa karena Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru telah selesai menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) 2016-2021 yang di dalamnya terdapat sasaran dan indikator kinerja. Renstra sebagai dokumen perencanaan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi jajaran aparatur dan pranata yang berada di bawah lingkup Dinas Pendidikan serta pihak-pihak pemangku kepentingan (para stakeholders) dalam membuat perencanaan pembangunan pendidikan.

Sebagaimana diketahui Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru merupakan lembaga pelaksana kewenangan Walikota Banjarbaru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu Renstra Perubahan 2016-2021 ini tidak lain adalah sebagai tindak lanjut perencanaan pada tingkat SKPD yang bertujuan mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru seperti yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2016-2021, khususnya pada bidang pendidikan dan merujuk kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebab Dinas Pendidikan juga memiliki tugas untuk menyukseskan program-program nasional bidang pendidikan.

Di dalam Renstra Perubahan tahun 2016-2021 ini, terdapat program prioritas Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang mengacu pada program prioritas yang telah tertuang di dalam RPJMD Kota Banjarbaru dan program-program lain yang mendukung program prioritas tersebut dan sekaligus untuk menjawab isu-isu strategis yang ada pada bidang pendidikan Kota Banjarbaru.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran agar semua kegiatan pembangunan bidang pendidikan di Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta lebih terarah dengan adanya Renstra 2016-2021 ini.

Banjarbaru, Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DR. Hj. RAHMAH KHAIRITA,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700503 199003 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD tersebut, tertuang dengan jelas dalam Pasal 20, Pasal 21 Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32. Selain itu juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sebuah system pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemeratan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia dan setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemeratan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan mencetak warga negara Indonesia yang memiliki kecakapan hidup (*life skill*), sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya, serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di Kota Banjarbaru, pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, yang memuat visi ***Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter.***

Berdasarkan RPJPD dan RPJMD tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021, sebagai kelanjutan dan kesinambungan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tahun 2011-2015.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis, Sanggar Kegiatan Belajar, serta semua pendidik dan tenaga kependidikan dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi

program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
13. Peraturan Walikota Banjarbau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Walikota Banjarbau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
15. Peraturan Walikota Banjarbau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Walikota/Wakil Walikota yang terpilih sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah untuk mensinergikan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan dan kesinambungan pembangunan pendidikan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap upaya bersama mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan
- 3.2 Telaahan Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dengan lahirnya Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2016, yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sebagai berikut :

a. Tugas Pokok.

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pendidikan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Pendidikan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Sesuai dengan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang berlaku sekarang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat, membawahi :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Perencanaan
 - c). Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 - a). Seksi PAUD

- b). Seksi Pendidikan Masyarakat
- c). Seksi Sarana dan Prasarana PAUD
- 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a). Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar
 - b). Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar
 - c). Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
- 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a). Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama
 - b). Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - c). Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
- 6. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a). Seksi PTK Paud dan Dikmas
 - b). Seksi PTK Sekolah Dasar
 - c). Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan secara komprehensif, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru
2. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Sekretariat dan Bidang-Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas Pokok Sekretariat adalah Menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretaris memiliki fungsi ;

- a. Menyusun rencana dan program kerja pada dinas Pendidikan;
- b. Menghimpun dan menyusun laporan tahunan Dinas Pendidikan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. Membuat konsep laporan dinas Pendidikan berdasarkan dari sub bagian sebagai bahan masukan;

- d. Mengatur pelaksanaan urusan keuangan meliputi penata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;
- e. Mengatur pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pemeliharaan kendaraan dinas, surat menyurat, pengadaan alat tulis kantor/inventaris, pencetakan, pemeliharaan gedung/kantor, perjalanan dinas rutin, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan capeg, penyusun Sasaran Kerja Pegawai, usulan karpeg/karis/karsu/taspen, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif pegawai negeri sipil di lingkungan dinas Pendidikan;
- f. Mengatur penggunaan dan penyediaan perlengkapan kantor;
- g. Mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai bidang tugasnya;
- h. Memberikan petunjuk kepada sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan petunjuk dan pelayanan administrasi kepada satuan kerja di lingkungan dinas Pendidikan;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan kepada bidang-bidang sesuai bidang tugasnya;
- k. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan sub bagian;
- l. Memberikan saran dan telaahan kepada atasan sesuai dengan tugas sekretaris;
- m. Membuat laporan kegiatan sekretariat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Tugas Pokok bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pembinaan PAUD dan pendidikan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mengemban fungsi :

- a. Merencanakan kerja dan program Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan Kepala Seksi;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait;
- f. Merumuskan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan sebagai pelaksanaan tugas;
- g. Mengatur dan mengawasi terselenggaranya kebijakan pelaksanaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Merumuskan dan menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan bahan evaluasi belajar tingkat PAUD sebagai pedoman bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk pengembangan Pendidikan Kesetaraan;
- j. Menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan PAUD;
- k. Membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- m. Memberikan nota pertimbangan/advise kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n. Melaporkan secara berkala kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Tugas Pokok bidang Pembinaan Sekolah Dasar mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pembinaan sekolah dasar.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pembinaan Sekolah Dasar mengemban fungsi :

- a. Merencanakan kerja dan program Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan Kepala Seksi;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait;
- f. Merumuskan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan sebagai pelaksanaan tugas;
- g. Mengatur dan mengawasi terselenggaranya kebijakan pelaksanaan Sekolah Dasar;
- h. Merumuskan dan menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan bahan evaluasi belajar tingkat Sekolah Dasar sebagai pedoman bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk pengembangan Sekolah Dasar;
- j. Menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan Sekolah Dasar;
- k. Membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;

- m. Memberikan nota pertimbangan/advise kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n. Melaporkan secara berkala kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Tugas Pokok bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mengemban fungsi :

- a. Merencanakan kerja dan program Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan Kepala Seksi;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait;
- f. Merumuskan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan sebagai pelaksanaan tugas;
- g. Mengatur dan mengawasi terselenggaranya kebijakan pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Merumuskan dan menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan bahan evaluasi belajar tingkat Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
- j. Menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
- k. Membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- m. Memberikan nota pertimbangan/advise kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n. Melaporkan secara berkala kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

5. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tugas Pokok bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengemban fungsi :

- a. Merencanakan kerja dan program Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan Kepala Seksi;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait;
- f. Merumuskan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan sebagai pelaksanaan tugas;
- g. Membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. Memberikan nota pertimbangan/advise kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- j. Melaporkan secara berkala kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

KETERANGAN :
 [Garis] : Garis Komando
 [Kotak] : Kelompok Jabatan Fungsional

DINAS PENDIDIKAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR | BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH | BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA K

SEKSI PAUD

SEKSI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR

SEKSI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH

SEKSI PTK PAUD

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

SEKSI KURIKULUM DAN KEMERDEKAAN SEKOLAH

SEKSI KURIKULUM DAN KEMERDEKAAN SMP

SEKSI PTK SEKOLAH DASAR

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP

SEKSI PTK SEKOLAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Sumber daya perangkat daerah pada lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. **Sumber Daya Manusia** (Pegawai Disdik, Guru / Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta didik);
2. **Prasarana** (Lahan, Sekolah, Ruang Kelas/Belajar, Laboratorium, Ruang Penunjang Lainnya, Fasilitas Olahraga, Musholla, Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru);
3. **Sarana** (Meubelair, papan tulis, LCD, Buku Pelajaran, Bahan dan alat Praktikum, Alat Peraga, Buku Perpustakaan atau Buku Penunjang, bahan KBM lainnya, dan lain-lain);
4. **Kurikulum** sebagai acuan proses belajar mengajar (Kurikulum 2006 dan 2013, Kurikulum Muatan Lokal);
5. **Dana**, dana sebagai sumber pembiayaan operasional lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dan Satuan Pendidikan.

Sumber daya tersebut diatas merupakan satu kesatuan atau komponen dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Banjarbaru. Dalam menyelenggarakan pendidikan SKPD Dinas Pendidikan dan UPTD memiliki SDM seluruhnya berjumlah 134 orang pegawai, yang berstatus PNS/CPNS sebanyak 83 orang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 43 orang dan pegawai perempuan sebanyak 40 orang yang terdistribusi pada sekretariat, dan bidang-bidang serta UPTD. Kemudian yang berstatus Non PNS/Honorer sebanyak 51 orang terdiri dari tenaga honorer laki-laki sebanyak 31 orang dan tenaga honorer perempuan sebanyak 20 orang juga terdistribusi pada sekretariat, dan bidang-bidang serta UPTD. Gambaran secara umum keadaan pegawai di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru dan UPT
Keadaan 2016

Unit Kerja	Jumlah Pegawai					
	PNS (orang)			Non PNS (orang)		
	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
Dinas Pendidikan	34	31	65	24	15	39
1. Sekretariat	12	9	21	10	6	16
2. Bid.Pembinaan SD	5	6	11	8	1	9
3. Bid.Pembinaan SMP	8	3	11	2	3	5
4. Bid. Pembinaan	5	6	11	2	3	5

PAUD						
5. Bid.Pembinaan P2TK	4	7	11	2	2	4
II. UPTD Wilayah I	3	3	6	1	2	3
III. UPTD Wilayah II	3	4	7	3	-	3
IV. UPTD SKB	3	2	5	3	3	6
TOTAL PEGAWAI	43	40	83	31	20	51

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menempati kantor yang berada di Jalan Pendidikan No. 1 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel. 2.2.2

Komposisi Jumlah Perlengkapan

No	Barang Inventaris	Jumlah	
1	Sound System	4 buah	
2	Microphone	4 buah	
3	Gorden	200 lbr	
4	P.C. Unit	21 buah	
5	Lap Top	34 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	138 buah
6	Note Book	35 Proyektor + Attachment	3 buah
7	Printer	36 Camera Electronic	1 buah
8	Server	37 Facsimile	2 buah
9	Sepeda Motor	38 AC	5 buah
10	Mesin Ketik Manual	39 Brankas	1 buah
11	Mesin Hitung Elektronik	40 Filling Besi	29 buah
12	Lemari Besi	41 Handycam	1 buah
13	Lemari Kayu	39 Website	1 buah
14	Mesin Absensi	2 buah	
15	Papan Struktur Instansi	4 buah	
16	Sofa	4 buah	
17	Mesin Penghisap debu	1 buah	
18	Lemari ES	4 buah	
19	Kipas Angin	6 buah	
20	Televisi	5 buah	
21	Wireless	3 buah	
22	Tangga Alumunium	1 buah	
23	Dispenser	4 buah	
24	CCTV	2 buah	
25	Scanner	3 buah	
26	Peralatan Jaringan Lain-lain	3 buah	
27	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	88 buah	
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8 buah	
29	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	138 buah	
30	Proyektor + Attachment	3 buah	
31	Unintemuptible Power Supply (UPS)	5 buah	
32	Camera Electronic	1 buah	
33	Facsimile	2 buah	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat yang harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Sejalan dengan tujuan tersebut Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru bertekad untuk untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing melalui pendidikan untuk Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Kualitas potensi diri peserta didik dan tenaga kependidikan di Banjarbaru digambarkan dengan perubahan perilaku ke arah perilaku berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara dan masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab secara merata.

Capaian kinerja hasil pelayanan pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan tujuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mewujudkan pemerintahan yang baik dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

.4.1 Tantangan

- a. Adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang bermutu;
- b. Adanya mobilitas penduduk yang tinggi yang berpotensi menimbulkan masalah pendidikan baru;
- c. Penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga ada wilayah-wilayah tertentu yang penduduknya padat;
- d. Tingkat partisipasi masyarakat dan swasta dibidang pendidikan masih rendah;
- e. Tingkat pengetahuan masyarakat dibidang pendidikan masih rendah;
- f. Tumbuhnya pelayanan pendidikan swasta yang mutunya lebih baik;

- g. Tingkat ekonomi masyarakat masih rendah;
- h. Masih adanya budaya masyarakat yang tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan pendidikan;

.4.2 Peluang

- a. Dukungan DPRD Kota Banjarbaru serta pemangku kepentingan lain dalam pembangunan pendidikan
- b. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
- c. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah termasuk di dalamnya adalah Standar Nasional Pendidikan
- d. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan
- e. Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak di bidang pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam membangun kualitas pendidikan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Menyikapi hal demikian analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan. Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat)*.

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur ; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a) Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru secara berseninambungan, efektif efisien dan bersinerji menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali. Hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya prestasi kejuaraan baik dalam penguasaan materi akademis maupun non akademis seperti prestasi olahraga ditingkat propinsi, nasional maupun internasional. Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kota Banjarbaru untuk mendukung dan memantapkan misi Kota Banjarbaru dalam mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia sebagaimana visi yang telah ditetapkan "**Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter**". Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru berupaya

mendukung misi Kota Banjarbaru dengan menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan profesionalisme dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan Pendidikan Karakter menuju *good governance* melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

- b) Tersedianya sumberdaya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan.
- c) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dunia Global. Hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil.
- d) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

2. Kelemahan

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi Ekonomi yang mengakibatkan banyaknya anak rawan dan putus sekolah, faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi perilaku anak disamping masih terdapat anak-anak yang masuk usia sekolah tapi enggan untuk bersekolah.

Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar.

Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Dilain pihak kemampuan tenaga kependidikan untuk mengembang tugasnya secara profesional melalui pelatihan – pelatihan masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metode pembelajaran, dan murid. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam upaya mencapai IPM yang ditargetkan adalah :

a) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan adalah:

- 1) Masih rendahnya angka partisipasi kasar PAUD Formal ;
- 2) Masih rendahnya angka partisipasi kasar PAUD Non Formal;
- 3) Upaya mempertahankan angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A;
- 4) Upaya mempertahankan angka partisipasi murni SD/MI/Paket A;
- 5) Upaya mempertahankan angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B;
- 6) Upaya mempertahankan angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B;
- 7) Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang bersumber melalui jalur migrasi;

b) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan jangkauan layanan pendidikan bagi remaja dan orang dewasa adalah:

- 1) Walaupun Banjarbaru adalah sebuah Kota yang dianggap maju tapi masih ada penduduk yang buta aksara, meskipun jumlahnya sedikit;
- 2) Masih rendahnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi untuk memberikan keterampilan bagi remaja dan orang dewasa;
- 3) Angka rata-rata lama sekolah masih berkisar pada 10,76 tahun (kelas II SMA/SMK semester I) ;
- 4) Angka harapan lama sekolah masih berkisar pada 14,77 tahun (Diploma II),

c) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan layanan pendidikan sekolah

yang bermutu dan berwawasan lingkungan adalah:

- 1) Masih rendahnya persentase satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi secara lokal;
- 2) Belum seluruh satuan SD yang terakreditasi A;
- 3) Belum seluruh satuan SMP yang terakreditasi A;
- 4) Belum seluruh satuan SD yang berpredikat sekolah Adiwiyata;
- 5) Belum seluruh satuan SMP yang berpredikat sekolah Adiwiyata;
- 6) Belum terpenuhinya capaian indikator SPM pada sekolah SD;
- 7) Masih rendahnya persentase satuan pendidikan pada Bina SD yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter;
- 8) Belum terpenuhinya capaian indikator SPM pada sekolah SMP;
- 9) Masih rendahnya prosentase satuan pendidikan pada Bina SMP yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter.

d) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan efektifitas layanan pendidikan adalah:

- 1) Masih adanya anak putus sekolah tingkat SD;
- 2) Upaya mempertahankan angka kelulusan SD;
- 3) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket A;
- 4) Upaya mempertahankan angka melanjutkan siswa SD/MI;
- 5) Masih adanya anak putus sekolah tingkat SMP;
- 6) Upaya mempertahankan angka kelulusan SMP;
- 7) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket B;
- 8) Upaya mempertahankan angka melanjutkan siswa SMP/MTs;
- 9) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket C.

e) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah:

- 1) Masih rendahnya jumlah PTK PAUD yang mengikuti PKB PAUD (52,62%)
- 2) Masih rendahnya jumlah PTK SD yang mengikuti PKB SD (55,08%)
- 3) Masih rendahnya jumlah PTK SMP yang mengikuti PKB SMP(24,32%)

f) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan layanan dan akuntabilitas adalah:

- 1) Upaya tindak lanjut temuan BPK/Inspektorat;
- 2) Upaya peningkatan indeks kepuasan pelayanan internal;
- 3) Upaya menurunkan keluhan pengaduan layanan internal yang ditindaklanjuti;
- 4) Nilai evaluasi Akip yang masih CC;

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor diluar lembaga kedinasan yang ikut mempengaruhi dan mewarnai terhadap kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru. Dalam hal ini faktor-faktor luar termaksud adalah situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi.

1. Peluang

- a) Media masa elektronik maupun cetak yang bersekala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kota Banjarbaru, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b) Kota Banjarbaru sebagai Kota Penyanggah atau pintu masuk Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tujuan bagi orang-orang dari luar kota untuk menuntut ilmu karena memiliki perguruan tinggi favorit baik dan sekolah-sekolah dan pesantren. Selain itu Kota Banjarbaru juga sebagai sentral pendidikan yang memiliki banyak lembaga

pendidikan yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, potensi ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh jajaran pendidikan di Kota Banjarbaru untuk bersama-sama membangun SDM yang cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki keunggulan kompetitif, berakhlak mulia dan berkarakter.

- c) Besarnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (*stakeholders*) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang fasilitasi melalui implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS), Badan Akreditasi Sekolah (BAS), Sekolah Inklusif serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) atau Paguyuban Kelas, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan (DP).
- d) Kota Banjarbaru terdiri dari 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan, mempunyai Luas wilayah 371,38 km². Luas. Batas wilayah Kota Banjarbaru adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
 - Sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut ;

2. Tantangan

- a) Kota Banjarbaru sebagai kota pendidikan artinya akan menjadi tempat tujuan untuk mencari ilmu dan investasi telah mengundang banyak orang untuk bermigrasi yang berakibat terhadap tingginya APK dan APM, hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kota Banjarbaru guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya wajar pendidikan menengah 12 tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.
- b) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negarif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks didalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru, hal ini menurut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak.
- c) Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang,

mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif di Kota Banjarbaru karena, terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjajanya.

Melihat kekuatan maupun kelemahan yang ada, secara faktual Kota Banjarbaru memiliki peluang untuk dapat berkembang sebagai Kota Pendidikan yang dapat memberikan layanan tidak hanya terhadap masyarakat kota namun dapat terus diperluas kepada masyarakat di sekeliling Kota Banjarbaru, bahkan untuk masyarakat dimanapun yang mendambakan pelayanan pendidikan yang baik. Dengan ditangani secara sinergi dalam sistem pengembangan pada bidang-bidang lainnya di Kota Banjarbaru, bidang pendidikan dapat membuka peluang kerja yang luas, serta secara tidak langsung bersentuhan dengan dinamisasi kegiatan ekonomi masyarakat luas.

Analisis berikutnya diarahkan pada bentuk-bentuk ancaman. Ancaman potensial yang dapat menjadi penghambat pengembangan bidang pendidikan adalah kelemahan dalam mengelola potensi yang ada sekarang sehingga dapat menyebabkan kualitas layanan bidang pendidikan tidak dapat berkembang. Penyelenggaraan sekolah yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada berbagai tatanan kehidupan. Ketidakefektifan itu dapat menyebabkan pencapaian target kurikulum rendah, pengetahuan siswa terbatas, pengembangan kemampuan profesional tenaga kependidikan tidak sesuai dengan harapan layanan masyarakat yang kritis, tawuran pelajar, pengaruh penyalahgunaan obat-obat terlarang dan lain-lain, yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya mutu penampilan siswa sehingga tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Daerah Terpilih

1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru

Visi Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yang ditetapkan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (H. Nadjmi Adhani dan Darmawan Jaya Setiawan) untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru tanggal 9 Desember 2015, adalah "**Terwujudnya Banjarbaru**

sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter”.

Adapun Misi Rencana Strategis Pemerintah Kota Banjarbaru 2016—2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana, perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Dengan terpilihnya kedua pasangan tersebut pada pelaksanaan Pilkada tersebut sebagai Walikota dan Wakil Walikota maka Visi tersebut secara otomatis menjadi Visi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Berkarakter pada visi tersebut terdiri atas 2 (dua) aspek penting, yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Dari misi - misi tersebut di atas, ditetapkan 9 (Sembilan) Program Unggulan dan 9 (sembilan) Perubahan Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021, yakni

1) 9 (sembilan) Unggulan ;

1. Raskin Gratis,
2. Pengobatan Gratis bagi masyarakat yang tidak mampu,
3. Pendidikan dan angkutan pelajar gratis/bersubsidi,
4. Pembayaran santunan kematian paling lama 1 (satu) minggu,
5. Mendukung kegiatan komunitas pemuda, seni dan budaya
6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Pegawai dan Tenaga Pendidik
7. Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kependudukan, Pelayanan Perizinan)
8. Membangun Pasar Tradisional Modern, Ruang Terbuka Islami dan Kawasan Olah Raga

9. Membentuk Karakter Masyarakat Banjarbaru Yang Religius, Berbudi Luhur Dan Cinta Tanah Air

2) **9 (sembilan) Perubahan :**

1. Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, Hukum Dan Perundangan, Sumber Daya Manusia, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.
2. Mewujudkan pemerintah Kecamatan/Kelurahan sebagai Pusat Layanan Masyarakat
3. Pembangunan Infrastruktur perkotaan dengan jalan dan drainase serta pusat-pusat pertumbuhan dan ruang terbuka hijau serta memantapkan interkoneksi.
4. Pengembangan sarana Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh di setiap kecamatan dan pusat kegiatan masyarakat,
5. Pengembangan dan Penataan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah.
6. Penciptaan Wirausaha Baru dan pengembangan UMKM
7. Pembinaan Masyarakat Olah Raga
8. Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan Dan Pendidikan
9. Menciptakan Banjarbaru Bersih, Hijau dan Sehat

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik, tabel berikut memberikan deskripsi lengkap makna insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 3.1. Makna Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Insan Makna Indonesia kompetitif
Cerdas spiritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.	Berkepribadian unggul dan

		gandrung akan keunggulan
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya • Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (f) menghargai kebinnekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (g) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersemangat juang tinggi • Jujur • Mandiri • Pantang menyerah • Pembangunan dan pembinaan jejaring • Bersahabat dengan perubahan • Inovatif dan menjadi agen perubahan • Produktif
Cerdas Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. • Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Sadar mutu • Berorientasi global • Pembelajaran sepanjang hayat • Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, terampil, dan tereng-ginas • Beraktualisasi insan adiraga 	

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi

pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019, yakni **“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong “**. Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah dimaksudkan untuk menekankan arti sangat penting atas peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Adapun Misi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
- b. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
- c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
- d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan religius, mandiri dan berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya 7 (tujuh) elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah dimaksudkan untuk menekankan arti sangat penting atas peran pelaku dalam suatu ekosistem yang religius dan mandiri sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan dalam bermasyarakat dengan norma-norma keagamaan serta tidak merasakan ketergantungan pihak lain .

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekolah yang kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang sangat penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kompetensi sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus mempunyai naluri yang peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya mengerti dan memahami terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar

3. Peran aktif Orang Tua

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif

4. Masyarakat yang sangat peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.

Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah

5. Peran Dunia Usaha / Dunia Industri

Di negara -negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak mereka tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan .

6. Kontribusi Organisasi Profesi

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan

7. Peran Optimal Pemerintah

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak peserta didik, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dapat terpenuhi.

Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenis, jenjang dan satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas hasil belajar baik antar sekolah, antar wilayah, antar kab, dan antar regional, antar provinsi maupun pada tingkat regional dan internasional,

Dalam merwujudkan sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah daerah dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya, baik dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana dari penggunaan dana pendidikan baik yang bersumber APBD daerah, APBD Provinsi maupun APBN.

Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBD II, APBD Provinsi, dan APBN dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknasebagai berikut :

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmonis sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air ;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia ;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak ;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut: Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memosisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

Tabel.3.2

Kode	Misi
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan

- memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstratersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

3.3.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

a. Visi

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan mengangkat visi Pendidikan yaitu :” **Mewujudkan Layanan Pendidikan Inklusif Menuju SDM yang Cerdas, Kompetitif, Terampil dan Berkarakter Akhlak Mulia**”.

Visi tersebut adalah mengarah pada kualitas potensi diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di Kalimantan Selatan digambarkan dengan perubahan perilaku ke arah perilaku yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara dan masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab secara merata (*tujuan pendidikan berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*).

Penjelasan makna atas pernyataan visi di atas adalah :

1. Mewujudkan Layanan Pendidikan Inklusif

Memberi kesempatan seluas-luasnya untuk semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan sosial atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai diskriminatif dan keanekaragaman, mengutamakan adanya persamaan di antara banyaknya perbedaan peserta didik dengan jenis kelamin, suku, sosial ekonomi, latar belakang, kemampuan dan ketidakmampuan agar bisa menyatu dalam satu persamaan di lingkungan sekolah yang sama.

2. SDM

Sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang terkandung dalam arti manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

3. Cerdas

Cerdas digunakan untuk menjelaskan sifat [pikiran](#) yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan [menalar](#), [merencanakan](#), [memecahkan masalah](#), berpikir [abstrak](#), memahami gagasan, menggunakan [bahasa](#), dan [belajar](#). Mencerdaskan bangsa merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat, terutama insan pendidikan perlu terus berupaya untuk melakukan inovasi dan akselerasi dalam mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai program pendidikan.

4. Kompetitif

Kompetitif adalah mempunyai kemampuan untuk berkualitas (unggul), bersemangat juang tinggi, jujur, mandiri, pantang menyerah, produktif, sadar mutu, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, pembelajaran sepanjang hayat, berorientasi global, dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

5. Terampil

Terampil adalah suatu bentuk kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan dalam mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Tuntutan keterampilan, baik secara

teknis maupun secara spesifik saat ini menjadi tuntutan masyarakat global. Perusahaan dan bidang jasa pengguna lulusan sekolah kini sangat selektif untuk merekrut tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja saat ini tidak hanya ahli saja, tetapi yang dibutuhkan adalah yang benar-benar ahli dan memiliki kecerdasan serta keterampilan.

6. Berkarakter

Berkarakter bermakna sumberdaya pendidikan mampu menunjuk kankarakter manusiaterdidikyangberwawasankebangsaantapa meninggalkannilailuhur kearifan lokal. Perkembangan dan pembentukan karakter memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses [pembelajaran](#), pelatihan, pembiasaan terus-menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan serta harus dibarengi dengan nilai-nilai luhur.

7. Akhlak Mulia

Usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk pribadi, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram baik serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman nilai-nilai agama, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah positif yang nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan kebiasaan bertingkah laku, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak mulia.

b. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi pendidikan di atas, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kabupaten/Kota untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

2. Mewujudkan mutu pembelajaran dan keterampilan guru dan peserta didik.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan di Kalimantan Selatan. Dimana untuk mencapai mutu pembelajaran terlebih dahulu guru harus membekali diri dengan sejumlah kompetensi dalam bidang pengajaran yang dilakukan secara kontinyu seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan dunia pendidikan, sehingga pada akhirnya akan membentuk sikap lebih profesional dari guru itu sendiri. Jika sikap profesional telah dimiliki, maka secara otomatis mutu pembelajaran akan dicapai secara optimal yang ditandai oleh prestasi belajar dan keterampilan siswa meningkat, lulusan mampu bersaing untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya maupun masuk ke dunia kerja.

3. Mewujudkan pengembangan pembelajaran kurikulum muatan lokal bagi guru dan peserta didik.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pembelajaran kurikulum muatan lokal dengan menggali keunggulan potensi lokal sebagai kurikulum yang berdaya saing dengan daerah lain, melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah dan pendidikan dasar.

4. Mewujudkan pelayanan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus pada semua jenjang pendidikan dan ketunaan di Kalimantan Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarbaru merupakan sebuah kota yang baru dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,30 km² (37.130 ha) atau 3,8 x luas Banjarmasin atau ½ luas Jakarta. Banjarbaru merupakan bagian dari kawasan perkotaan Banjar Bakula.[2] Banjarbaru terbagi atas 5 kecamatan dan 20 kelurahan. Sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 – 2034, pasal 46 ayat 1 huruf d menyebutkan kawasan pendidikan. Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri atas :

- a. Kawasan pendidikan pada sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan, meliputi Taman

Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

- b. Kawasan pendidikan perguruan tinggi yang telah ada berada di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan; dan
- c. Kawasan rencana pengembangan kampus IAIN di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- 3.5.1. Belum meratanya jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan.
- 3.5.2. Belum meratanya jangkauan layanan pendidikan bagi remaja dan orang dewasa
- 3.5.3. Belum meratanya kualitas layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan
- 3.5.4. Belum meratanya efektifitas layanan pendidikan
- 3.5.5. Belum meratanya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- 3.5.6. Masih rendahnya layanan dan akuntabilitas kinerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Untuk merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2016-2021 yang lebih jelas menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

4.1.1 Tujuan

Didasarkan kepada visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan jangka menengah Kota Banjarbaru, adalah meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dengan cakupan :

1. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah.
2. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan bagi remaja dan orang dewasa.
3. Meningkatkan layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan efektifitas layanan pendidikan
5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
6. Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja

4.2.2 Sasaran

Sasaran strategis adalah menjabarkan dari tujuan suatu kegiatan yang akan dihasilkan atau akan dicapai yang sifatnya sangat spesifik dan nyata. Untuk memudahkan mencapai sesuatu tujuan tersebut adalah Meningkatkan Pemerataan kualitas pendidikan, dengan cakupan :

1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah..
2. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan bagi remaja dan orang dewasa.
3. Meningkatnya layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan
4. Meningkatnya efektifitas layanan pendidikan
5. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
6. Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

Tujuan			Sasaran							Strategi	
Uraian	Indikator	Target 2021	Uraian	Indikator	Target					Kebijakan	Program
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	10,80	Meningkatnya Pemerataan kualitas pendidikan	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	10,76	10,77	10,78	10,79	10,80	Peningkatan Pemerataan kualitas pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Angka Harapan Lama Sekolah	14,82		Angka Harapan Lama Sekolah	14,78	14,79	14,80	14,81	14,82		Program Pendidikan Non Formal
											Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
											Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga kependidikan
											Program Manajemen Pelayanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada periode itu. Strategi dan arah kebijakan merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan Pendidikan Oleh karena itu, Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan ke dalam Renstra Pendidikan Kota Banjarbaru.

Dalam rangka mempertajam strategi dan arah kebijakan pendidikan memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategi Pendidikan dan Kebudayaan yang pada akhirnya mencapai sasaran Pemerintah Kota Banjarbaru. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru atau Peraturan Walikota Banjarbaru.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan Strategi dan arah kebijakan pendidikan, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

Uraian mengenai Strategi dan arah kebijakannasional dalam Renstra ini merupakan penugasan RPJMD kepada Dinas Pendidikan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kota Banjarbaru, sesuai dengan terutama dalam pencapaian prioritas pembangunan pendidikan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam lima tahun ke depan dan kondisi lingkungan strategis. Permasalahan pokok bangsa yang mendasar dalam pembangunan pendidikan adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lunturnya budaya menghormati keragaman memupuk munculnya sikap-sikap permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan di masyarakat yang diperburuk dengan tergerusnya karakter bangsa akibat kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan dunia tanpa batas yang merupakan ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.

Adapun tantangan utama pembangunan pendidikan dalam lima tahun ke depan ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; serta (ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif. Tantangan dalam peningkatan

kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dalam lima tahun ke depan adalah melaksanakan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian peserta yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan. dalam hal demikian tantangan yang dihadapi bersama dalam pembangunan pendidikan adalah :

1. mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas
2. meningkatkan akses pendidikan dasar untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin,
4. memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, dan
5. meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa,
6. meningkatkan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian peseta yang matang,dan
7. pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan

Selanjutnya tantangan dalam memperkukuh karakter dan jati diri bangsa dapat dilakukan dengan cara :

1. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif,
2. meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa;
3. meningkatkan promosi dan diplomasi budaya antardaerah,
4. meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Tantangan utama dalam pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing sehingga dapat mendukung proses pembangunan ke depan secara efektif dan efisien.

Strategi pembangunan pendidikan, di antaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak serta mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Pemerataan pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu keharusan untuk menghilangkan/ memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, khususnya wilayah perkotaan dan pinggiran.

Pembangunan manusia Indonesia merupakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang merupakan pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan periode ini dilakukan, antara lain :

1. meningkatnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
2. meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat.
4. meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
5. meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
6. meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru
7. meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
8. meningkatnya dukungan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

Dalam upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak usia sekolah tanpa terkecuali dapat

menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui hal sebagai berikut:

- a) peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah 7 – 15 tahun dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu dengan memfasilitasi pembuatan KPS,
- b) penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
- c) peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antarwilayah dan kesenjangan gender;
- d) peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah,
- e) penyediaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA), untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter,
- f) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar yang berkualitas;
- g) penilaian terhadap sekolah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
- h) penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/ madrasah baru;
- i) penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah swasta, dan
- j) penguatan akuntabilitas sekolah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah

Dalam memperkuat jaminan kualitas dan kurikulum dan pelaksanaannya dalam keterkaitan pelayanan PAUD dan pendidikan dasar dan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) pemantapan penerapan SPM pendidikan dasar dan dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan PAUD dan pendidikan dasar,
- b) penguatan proses akreditasi untuk PAUD dan satuan pendidikan dasar negeri dan swasta;
- c) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
- d) penguatan kurikulum yang memberikan pengetahuan dan keterampilan;
- e) diversifikasi kurikulum dilakukan agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu peserta didik;
- f) penyiapan guru dilakukan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;

- g) evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
- h) peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
- i) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
- j) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktik pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
- k) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) dilakukan untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
- l) peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif
- m) penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
- n) penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel,
- o) peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
- p) penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
- q) pemanfaatan hasil penilaian peserta didik digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
- r) pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;

Dalam rangka melakukan pembentukan karakter peserta didik, Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa religius dan mandiri serta spirit berdikari. Pendidikan sejatinya merupakan hakikat pembentukan karakter peserta didik, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. pembentukan karakter peserta didik dapat dijalankan melalui

pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Pemupukan jiwa pembentukan karakter peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. Tentunya sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan pembentukan karakter peserta didik yaitu sebagai berikut :

- 1) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
- 2) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan peserta didik yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- 3) meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;

Dalam mewujudkan sasaran pembentukan karakter peserta didik perlunya dilakukan dengan mengembangkan pendidikan kewargaan di satuan pendidikan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui hal sebagai berikut:

- a) penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKn, IPS (sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi/antropologi), bahasa Indonesia;
- b) penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
- c) penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial; dan
- d) pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.

Sedangkan Secara ringkasan hubungan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dapat disajikan pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Pada Rancangan Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Pemerataan kualitas pendidikan	Memperluas Peningkatan Pemerataan kualitas pendidikan	Peningkatan Pemerataan kualitas pendidikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pendidikan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) 2016-2021 Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, yaitu :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

Program Pendidikan Anak Usia Dini,

Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun,

Program Pendidikan Non Formal,

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan,

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pencapaian target sasaran dan program melalui kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.10. Penyediaan Jasa Non PNS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.10 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.11 Pemeliharaan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.2. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

3.3. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pembangunan Ruang Ibadah

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Bina SD

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Bina SMP

5.10. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SD

5.11. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SMP

5.12. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SD

5.13. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SMP

5.14. Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SD

5.15. Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SMP

5.16. Pembangunan Gedung Sekolah Bina SD

5.17. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SD

5.18. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SMP

5.19. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SD

5.20. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SMP

5.21. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Bina SD

5.22. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Bina SMP

5.23. Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SD

5.24. Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SMP

5.25. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Bina SD

5.26. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Bina SMP

5.27. Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SD

5.28. Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SMP

5.29. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SMP

5.30. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Bina SD

5.31. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs Bina SMP

5.32. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bina SD

5.33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bina SMP

5.34. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Bina SD

5.35. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI (DAK)

5.36. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs (DAK)

Program Pendidikan Non Formal

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

7.1 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Data Pokok Sekolah

Tabel. 6.1

Program dan Kegiatan Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. APK Paud Formal
2. APK Paud Non Formal

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

3. Angka Melek Huruf

4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
5. Angka Harapan Lama Sekolah
6. Prosentase satuan PNF yang terakreditasi lokal
7. Angka kelulusan paket C

Program Pendidikan Non Formal

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8. APK SD/MI/Paket A
9. APM SD/MI/Paket A
10. APK SMP/MTs/Paket B
11. APM SMP/MTs/Paket B

12. Prosentase satuan SD yang terakreditasi A

13. Prosentase satuan SMP yang terakreditasi A

14. Jumlah Sekolah Hijau SD
15. Jumlah Sekolah Hijau SMP
16. Prosentase sekolah SD yang telah mencapai indikator SPM
17. Prosentase satuan pendidikan pada Bina SD yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter
18. Prosentase sekolah SD yang telah mencapai indikator SPM
19. Prosentase satuan pendidikan pada Bina SMP yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter
20. Angka putus sekolah SD
21. Angka kelulusan SD
22. Angka kelulusan paket A
23. Angka melanjutkan siswa SD/MI
24. Angka putus sekolah SMP
25. Angka kelulusan SMP
26. Angka kelulusan paket B
27. Angka melanjutkan siswa SMP

Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pembangunan Ruang Ibadah

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Bina SD

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Bina SMP

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SD

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SMP

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SD

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SMP

Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SD

Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SMP

Pembangunan Gedung Sekolah Bina SD

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SD

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SMP

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SD

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SMP

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Bina SD

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Bina SMP

Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SD

Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SMP

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Bina SD

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Bina SMP

Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SD

Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SMP

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SMP

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Bina SD

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs Bina SMP

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bina SD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bina SMP

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Bina SD

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI (DAK)

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs (DAK)

28. Nilai post test PKB PAUD

29. Nilai post test PKB SD

30. Nilai post test PKB SMP

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Data Pokok Sekolah

31. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

32. Indeks kepuasan pelayanan internal

33. Jumlah keluhan pengaduan pelayanan internal yang ditindaklanjuti

34. Nilai evaluasi AKIP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Non PNS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

BAB VII
KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun (2016)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Angka partisipasi Kasar Paud Formal	54,90	55,72	56,55	57,40	58,26	59,12	59,12
2.	Angka partisipasi Kasar Paud Non Formal	14,25	15,41	16,14	16,99	21,71	23,22	23,22
3.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	113,15	113,25	113,35	113,45	113,55	113,65	113,65
4.	Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	96,36	96,46	96,56	96,66	96,76	96,86	96,86
5.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	96,19	97,00	98,00	99,00	100	100	100
6.	Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B	80,56	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
7.	Angka melek huruf	99,25	99,40	99,55	99,69	99,84	99,99	99,99
8.	Angka rata-rata lama sekolah	10,75	10,76	10,77	10,78	10,79	10,79	10,80
9.	Angka harapan lama sekolah	14,77	14,78	14,79	14,80	14,81	14,82	14,82
10.	Prosentase satuan PNF yang terakreditasi secara lokal	7,27	14,55	21,82	29,09	36,36	45,45	45,45
11.	Prosentase satuan SD yang terakreditasi A	91,14	94,94	97,47	100	100	100	100

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun (2016)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	Prosentase satuan SMP yang terakreditasi A	81,82	90,91	100	100	100	100	100
13.	Jumlah Sekolah Hijau SD (Adiwiyata)	27,85	74,68	87,34	100	100	100	100
14.	Jumlah Sekolah Hijau SMP (Adiwiyata)	45,45	54,55	63,64	69,57	82,61	100	100
15.	Prosentase sekolah SD yang telah mencapai Indikator SPM	68,35	93,00	95,00	97,00	99,00	100	100
16.	Prosentase Satuan Pendidikan pada Bina SD yang sudah melaksanakan Kurikulum Pendidikan Karakter	0	6,33	12,66	18,99	25,32	31,65	31,65
17.	Jumlah sekolah SMP yang telah mencapai Indikator SPM	68,35	90,00	95,00	97,00	99,00	100	100
18.	Prosentase Satuan Pendidikan pada Bina SMP yang sudah melaksanakan Kurikulum Pendidikan Karakter	0	13,64	31,82	50,00	68,18	86,36	86,36
19.	Angka Putus Sekolah SD	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Angka Kelulusan SD	100	100	100	100	100	100	100
21.	Angka Kelulusan Paket A	100	100	100	100	100	100	100
22.	Angka Melanjutkan Siswa SD	98,87	99,22	99,67	99,85	100	100	100
23.	Angka Putus Sekolah SMP	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
24.	Angka Kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RJPMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru selama lima tahun kedepan bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Kota Banjarbaru dan SKPD serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja lima tahunan dalam pembangunan pendidikan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kota Banjarbaru 2016-2021 tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau dipandang strategis dalam lingkup regional maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi RENSTRA sesuai kebutuhan organisasi.

Efektifitas RENSTRA ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru khususnya dan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tabel. 2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
 Tabel 2011 s.d 2015

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke :					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke :					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke :				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BELANJA LANGSUNG DISDIK															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,088,360,500	2,436,217,300	2,265,359,900	2,711,463,000		1,876,623,036	2,157,253,186	2,061,973,710	2,347,324,782		89.86	88.55	91.02	86.57
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		328,070,200	604,157,100	267,183,312	461,735,000		248,479,572	323,193,335	72,308,990	365,054,507		75.74	53.49	27.06	79.06
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		46,650,000	106,305,000	75,000,000	90,000,000		43,526,000	63,838,000	67,974,675	74,172,250		93.30	60.05	90.63	82.41
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini :		2,219,605,000	5,386,023,150	6,058,443,000	8,347,795,612		1,632,620,999	4,551,732,759	5,636,507,446	8,014,403,790		73.55	84.51	93.04	96.01
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		26,718,667,529	29,315,737,328	34,086,219,226	38,802,795,250		19,781,350,668	24,661,403,344	28,172,686,822	33,058,126,613		74.04	84.12	82.65	85.20
6	Program Pendidikan Menengah		6,146,387,000	16,215,014,200	16,109,716,988	17,929,856,860		5,227,410,500	11,400,070,488	12,787,226,200	14,450,688,800		85.05	70.31	79.38	80.60
7	Program Pendidikan Non Formal		392,942,550	384,242,550	434,297,800	384,297,800		284,222,000	311,946,500	349,212,250	319,000,250		72.33	81.18	80.41	83.01
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		60,900,000	104,481,000	125,000,000	100,180,000		-	60,584,000	42,622,900	58,845,466		-	57.99	34.10	58.74
9	Program Manajemen Pendidikan		350,659,900	481,277,900	367,373,000	342,336,500		207,350,840	398,288,400	283,525,225	249,378,620		59.13	82.76	77.18	72.85
	Total Seluruh Program		38,668,512,679	55,033,455,528	59,788,593,226	69,170,460,022		29,335,048,415	43,928,310,012	49,474,038,218	58,936,995,078		75.86	79.82	82.75	85.21

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2011 - 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun :					Rasio Capaian pada Tahun :				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik				100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%				85	90	95	100	100	80	85	95	100	100	94.12	94.44	100.00	100.00	100.00
3	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris				70	75	85	95	100	80	60	80	95	100	114.29	80.00	94.12	100.00	100.00
4	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik				86	88	98	100	100	85	90	98	100	100	98.84	102.27	100.00	100.00	100.00
5	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan				90	95	100	100	100	95	64	95	100	100	105.56	67.37	95.00	100.00	100.00
7	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :																		
	a) Kelas I - II : 18 jam per minggu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	b) Kelas III : 24 jam per minggu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Satuan Pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku				75	80	85	90	95						-	-	-	-	-
8	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester				85	90	95	100	100	85	85	90	100	100	100.00	94.44	94.74	100.00	100.00
11	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).				85	90	95	100	100	85	100	100	100	100	100.00	111.11	105.26	100.00	100.00
13	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No.	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun :					Rasio Capaian pada Tahun :				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis				90	95	100	100	100	95	90	95	100	100	105.56	94.74	95.00	100.00	100.00
15	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik				71.42	78.57	85.71	92.85	100	75	75	100	100	100	105.01	95.46	116.67	107.70	100.00
16	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik				95	95	100	100	100	95	95	98	100	100	100.00	100.00	98.00	100.00	100.00
17	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan				90	95	100	100	100	90	90	100	100		100.00	94.74	100.00	100.00	-
18	Pendidikan anak usia dini																		
	APK PAUD				39.99	42.48	44.97	47.48	49.96						-	-	-	-	-
	Angka Pendidikan yang ditamatkan				3.72	4.48	5.23	5.98	6.73						-	-	-	-	-
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :																		
	- SD/MI				47.98	50.48	52.98	55.48	57.98	47.98	34.85	59.28	55.32	57.58	100.00	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	99.31
	- SMP/MTs				31.86	34.36	36.86	39.36	41.86	31.86	25.26	36.86	38.98	39.08	100.00	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	93.36
19	Angka kelulusan :																		
	- SD/MI				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	- SMP/MTs				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				114.99	118.36	118.73	121.73	123.28	101.48	101.48	118.73	98	99.95	88.25	#VALUE!	#VALUE!	80.51	81.08
21	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA				174.75	175.5	176.25	177	177.75	127.45	127.45	90	90	87.89	72.93	#VALUE!	51.06	50.85	49.45
22	Angka melek huruf				98.83	99.4	99.8	99.90	99.99	98.24	98.24	99.80	99.54	99.99	99.40	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	100.00
	Angka Penyandang Buta Aksara				1.59	1.48	1.36	1.24	1.13						-	-	-	-	-
23	Angka rata-rata lama sekolah :																		
	- SD/MI				6.04	6.02	6.01	6.01	6.01	6.04	6.04	6.04	6.01	6.04	100.00	100.33	100.50	#VALUE!	100.50
	- SMP/MTs				3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	100.00	100.00	100.00	#VALUE!	100.00
24	Angka partisipasi kasar																		
	- SD/MI				123.06	123.57	124.09	124.61	125.12	110.45	110.45	124.09	123.96	124.49	89.75	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	99.50
	- SMP/MTs				103.98	105.1	106.23	107.36	108.49	102.88	102.88	106.23	108.10	107.22	98.94	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	98.83
25	Angka pendidikan yang ditamatkan :																		
	- SD/MI				14.57	15.32	16.07	16.82	17.57	12.84	12.41	16.07	16.89	16.33	88.13	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	92.94
	- SMP/MTs				5.63	5.95	6.27	6.59	6.91	5.63	5.18	6.27	6.59	6.03	100.00	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	87.26
26	Angka partisipasi murni																		
	- APM SD/MI/paket A				95.4	96.9	97.65	98.40	99.15	96.66	89.04	97.65	98.86	99.21	101.32	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	100.06
	- APM SMP/MTs/paket B				82.7	82.95	83.2	83.40	83.6	83.76	87.43	83.20	83.81	83.91	101.28	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	100.37
	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains:																		
	SD/MI				60	65	70	76	76					76	-	-	-	-	100.00
	SMP/MTs				16	17	17	18	18					18	-	-	-	-	100.00
27	rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA				30.41	31.41	32.41	33.41	34.41	0	0	31.41	33.80	33.93	-	-	#VALUE!	#VALUE!	98.61
28	angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA				92.13	94.13	96.13	98.13	99.13	0	0	96.31	99.57	100	-	-	100.19	#VALUE!	100.88
29	angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA				3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	0	0	3.01	3.01	3.01	-	-	100.00	#VALUE!	100.00
30	angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA				84.03	84.58	84.73	84.98	85.18	0	0	84.78	84.51	85.46	-	-	#VALUE!	#VALUE!	100.33
31	angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA				4.93	5.18	5.43	5.68	5.93	0	0	5.43	5.55	5.58	-	-	#VALUE!	#VALUE!	94.10
32	angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/paket C				67.4	68.6	69.8	71.00	72.2	0	0	69.8	72.17	72.53	-	-	#VALUE!	#VALUE!	100.46
33	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains SMA/SMK/MA				175	176	177	178	179	0	0	154	173	179	-	-	87.01	97.19	100.00
34	Jumlah event iptek berskala regional dan nasional di Banjarbaru SMA/SMK/MA				3	3	4	4	5	0	0	4	3	5	-	-	100.00	75.00	100.00
35	Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT SMA/SMK/MA				3	4	5	6	7	0	0	4	5	7	-	-	80.00	83.33	100.00

TABEL 4.1**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD**

Tujuan			Sasaran							Strategi	
Uraian	Indikator	Target 2021	Uraian	Indikator	Target					Kebijakan	Program
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	10,80	Meningkatnya Pemerataan kualitas pendidikan	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	10,76	10,77	10,78	10,79	10,80	Peningkatan Pemerataan kualitas pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Angka Harapan Lama Sekolah	14,82		Angka Harapan Lama Sekolah	14,78	14,79	14,80	14,81	14,82		Program Pendidikan Non Formal
											Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
											Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga kependidikan
											Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tabel 5.2
Indikator Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

No	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
			PENDIDIKAN				100	735,515	100	959,768	100	3,818,409	100	4,021,657	100	3,965,646	100	4,001,607	100	6,692,121		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100	2,917	100	3,066	100	3,790	100	3,980	100	3,980	100	4,179	100	4,388		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100	197	100	408	100	238	100	250	100	262	100	275	100	275		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	100%		100	90	100	39	100	126	100	133	100	146	100	146	100	146		
				Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD/TK)	58,35%	persen	54,9	6,526	55,72	7,894	56,55	1,915	57,39	2,011	58,25	2,112	59,12	2,217	59,12	2,217		
				1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	1	271,554	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	11	3,721,554		
				2. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir		M/Ms	150/8eq	0	0	250	100	600	100	600	100	600	100	600	100	2050		
				3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary		Ruang/Pak	1	40	0	0	6	240	6	240	2	80	2	80	16	680		
				4. Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	0	0	0	0	3	300	2	200	4	400	2	200	11	1,100		
				5. Pengadaan Mebeleur Sekolah		buah	51	50	50	50	100	150	100	150	100	200	100	100	411	700		
				6. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik		orang	310	0	360	100	255	285	305	325	365	350	370	360	370	370		
				7. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		bulan	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
				8. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini		bulan/org	12/1402	0	12/1393	12/1410	12/1430	12/1500	12/1510	12/1510	12/1510	12/1510	12/1510	12/1510	12/1510	12/1510		
				9. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini		kegiatan	4	0	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
				10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah PAUD		buah	0	0	4	60	10	150	10	200	10	200	10	250	44	760		
				11. Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fiskal)		Sekolah	116	2,090	170	6,100	180	6,600	190	7,000	200	7,200	210	7,500	1,066	36,490		
	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK):			35,857	0	41,957	0	36,052	0	37,854	0	39,747	0	41,734	0	41,734			
				- APK SD/MI	109,00%	persen	113,15	0	113,25	0	113,35	0	113,45	0	113,55	0	113,65	0	113,65			
				- APK SMP/MTs	105,00%	persen	96,19	0	97,00	0	98,00	0	99,00	0	100	0	100	0	100			
				Angka Partisipasi Murni (APM):																		
				- APM SD/MI	96,20%	persen	96,36	0	96,46	0	96,56	0	96,66	0	96,76	0	96,86	0	96,86			
				- APM SMP/MTs	86,90%	persen	80,56	0	81,00	0	82,00	0	83,00	0	84,00	0	85,00	0	85,00			
				Angka putus sekolah:																		
				- Jenjang SD	0,07%	persen	0,06	0	0,05	0	0,04	0	0,03	0	0,02	0	0,01	0	0,01			
				- Jenjang SMP	0,10%	persen	0,09	0	0,08	0	0,07	0	0,06	0	0,05	0	0,04	0	0,04			
				Persentase kelulusan:																		
				- Jenjang SD	100%	persen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100			
				- Jenjang SMP	100%	persen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100			
				Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	99,95%	persen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100			
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,74	tahun	10,75	0	10,76	0	10,77	0	10,78	0	10,79	0	10,80	0	10,80			
				Angka Harapan Lama Sekolah	14,75	tahun	14,77	0	14,78	0	14,79	0	14,8	0	14,81	0	14,82	0	14,82			
				Peningkatan sarana prasarana pendidikan:																		
				- Ketersediaan Unit sekolah Baru (USB) SD Lengkap		unit	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4			
				- Ketersediaan Unit sekolah Baru (USB) SMP Lengkap		unit	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2			
				1. Pembangunan Gedung Sekolah Bina SD		Tanah	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	3			
				2. Pembangunan Gedung Sekolah Bina SMP		Tanah	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2			
				3. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Bina SD		Ruang	19	0	12	0	9	0	9	0	9	0	9	0	58			
				4. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Bina SMP		Ruang	2	0	0	0	4	0	4	0	4	0	6	0	16			
				5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SD		Ruang	4	0	8	0	4	0	7	0	7	0	8	0	38			

No	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
				6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SMP		Ruang	0	2	0	0	10	10	10	10	32					
				7. Pembangunan Ruang Guru Sekolah Bina SD		Ruang	0	0	0	5	5	5	5	15						
				8. Pembangunan Ruang Guru Sekolah Bina SMP		Ruang	0	0												
				9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Bina SD		Ruang	2	0	0	4	6	4	4	16						
				10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Bina SMP		Ruang	0	1	0	2	3	4	10							
				11. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SD		Ruang	0	6	0	6	6	6	24							
				12. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SD		Ruang	0	0												
				13. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SMP		Ruang	0	1	0	1	2	2	6							
				14. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SMP		Ruang	2	0	3	6	8	5	24							
				15. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SD		Bilik	23	25	25	25	25	25	148							
				16. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SD		Bilik	47	0	0	0	0	0	47							
				17. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SMP		Bilik	6	25	0	20	20	16	87							
				18. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SMP		Bilik	32	0	0	24	20	18	94							
				- Jumlah rata-rata murid per kelas SD/MI	1:42		1:38	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32							
				- Jumlah rata-rata murid per kelas SMP/MTs	1:38		1:38	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36							
				Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	100	100	100	100	100	100	100	100							
				Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	85%	90	100	100	100	100	100	100	100							
				Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	93%	93	94	95	97	99	100	100	100							
				Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100%	100	100	100	100	100	100	100	100							
				Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKN dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	100	100	100	100	100	100	100	100							
				Persentase SD/MI yang memiliki satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	80%	85	90	95	100	100	100	100	100							
				Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi	100%	100	100	100	100	100	100	100	100							
				Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	100	100	100	100	100	100	100	100							
				19. Pembangunan Ruang Ibadah Bina SD		Ruang	5	5	0	6	6	6	28							
				20. Pembangunan Ruang Ibadah Bina SMP		Ruang	0	0	0	1	0	0	1							
				21. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah Bina SD		Ruang														
				22. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah Bina SMP		Ruang	0	0	0	2	2	1	5							
				21. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Bina SD		Ruang	4	4	5	5	5	5	28							
				22. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Bina SMP		Ruang	1	0	0	1	0	1	3							
				23. Pembangunan taman/Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir dan pagar Bina SD		M/Me	630	1785/4018	1500/4018	1500/4018	1500/4018	2500/4018	9415/20090							
				24. Pembangunan taman/Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir dan pagar Bina SMP		M/Me	150	100/2350	0	100/3250	150/3250	150/3500	650/2350							
				25. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Bina SD		Ruang	1	0	0	3	3	3	10							
				26. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Bina SMP		Ruang	0	0	0	0	1	1	2							
				27. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (DAK) Bina SD		sklh	6	6	11	13	15	7	58							
				28. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (DAK) Bina SMP		sklh	0	7	8	8	8	8	39							
				29. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SD		lomba	11	11	11	11	11	11	11							

No	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
				30. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SMP		lomba	16		14		14		15		15		15			
				31. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SD		orang	200		240		280		320		360		400			
				32. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SMP		orang	160		160	154,716	200		427,500	240	448,875	300	471,318	340	494,883	
				33. Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru dan Ujian Bina SD		siswa	4,155		4,155		4,155		4,350		4,450		4,450			
				34. Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru dan Ujian Bina SMP		siswa														
				35. Pengadaan Mebeleur Bina SD		Set/Buah	4737/356		224/277		825/127		825/127		825/127		825/127		8261/1341	
				36. Pengadaan Mebeleur Bina SMP		Set/Buah	102		501		193		1,656		1,656		1,830		5,938	
				35. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SD		buah	9,596		9,596		9,596		9,596		9,596		9,596		9,596	
				36. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SMP		buah	9,596		9,596		9,596		9,596		9,596		9,596		9,596	
				37. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Bina SD		sekolah	92		92		93		94		95		96		96	
				38. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs Bina SMP		sekolah	35		35		35		36		36		36		36	
				39. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bina SD		sekolah	92		92		93		94		95		96		96	
				40. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bina SMP		sekolah	35		35		35		36		36		36		36	
				41. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SD		orang	40		40		160		160		160		160		160	
				42. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SMP		orang	90		90		90		90		90		90		90	
				43. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Bina SD		sekolah	40		40		40		40		40		40		40	
				44. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Bina SMP		sekolah	60		60		60		60		60		60		60	
				45. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Bina SD		siswa														
				46. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Bina SMP		siswa														
				47. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Bina SD		Ruang														
				48. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Bina SMP		Ruang	0		0		0		1		1		1		3	
				49. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Bina SD		Ruang	0		0		12		15		9		7		43	
				50. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Bina SMP		Ruang	0		0		0		3		3		4		10	
			Program Pendidikan Menengah																	
				47. Pengadaan Pakaian Olahraga		stel	55		0		0		0		0		0		0	
				48. Pengadaan Mebeleur		buah	102		0		0		0		0		0		0	
				49. Rehabilitasi Sedang/berat Ruang kelas		ruang			0		0		0		0		0		0	
				50. Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Air Bersih dan Sanitary		ruang	18		0		0		0		0		0		0	
				51. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik		org	60		0		0		0		0		0		0	
				52. Pelatihan Penyusunan Kurikulum		org	40		0		0		0		0		0		0	
				53. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)		skih	30		0		0		0		0		0		0	
				54. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA		org	100		0		0		0		0		0		0	
				55. Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industr		org	1200		0		0		0		0		0		0	
				56. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah		keg	1		0		0		0		0		0		0	
				57. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		keg	1		0		0		0		0		0		0	
				58. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa		lomba	7		0		0		0		0		0		0	
				59. Penerimaan Siswa Baru dan Ujian Sekolah Menengah		org	3200		0		0		0		0		0		0	
				60. Bimbingan Teknis Petugas Perpustakaan Sekolah SMA/MA/SMK		org	35		0		0		0		0		0		0	
	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan bagi remaja dan orang dewasa	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan bagi remaja dan orang dewasa	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	99,53%		99,70	407	99,80	367	99,90	1,044	99,99	1,096	99,99	1,151	99,99	1,209	99,99	1,209
				61. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal		lembaga	13	143,303	15	143,300	10	135,000	10	140,000	8	125,000	8	130,000	8	130,000
				62. Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan		org	70	35,737	60	35,737	70	56,000	60	50,000	60	55,000	75	73,000	75	
				63. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan		org	250	90,842	250	90,842	240	100,550	200	100,500	100	70,000	50	40,000	0	

No	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
1.			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100	64	100	64	100	933	100	980	100	1,029	100	1,080	100	1,080
								159		163		166		174		179		186		186
1.			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100	88	100	90	100	92	100	96	100	99	100	103	100	103
2.			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100	71	100	72	100	74	100	78	100	80	100	83	100	83
								126		128		132		138		142		147		147
1.			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100	86	100	88	100	90	100	94	100	97	100	100	100	100
2.			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100	40	100	41	100	42	100	44	100	45	100	47	100	47

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Bidang Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)													
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
URUSAN WAJIB					269,351	243,853		232,936	244,572		256,789		269,617		269,617		
BELANJA TIDAK LANGSUNG				222,249	188,908		171,306	179,860		188,842		198,274		198,274			
BELANJA LANGSUNG				47,102	54,945		61,630	64,712		67,947		71,343		71,343			
PELAYANAN DASAR				269,351	243,853		232,936	244,572		256,789		269,617		269,617			
BELANJA TIDAK LANGSUNG				222,249	188,908		171,306	179,860		188,842		198,274		198,274			
BELANJA LANGSUNG				47,102	54,945		61,630	64,712		67,947		71,343		71,343			
PENDIDIKAN				269,132	243,634		232,717	244,353		256,570		269,398		269,398			
DINAS PENDIDIKAN				269,132	243,634		232,717	244,353		256,570		269,398		269,398			
BELANJA TIDAK LANGSUNG				223,030	188,689		171,087	179,641		188,623		198,055		198,055			
Belanja Pegawai				222,030	188,689		171,087	179,641		188,623		198,055		198,055			
BELANJA LANGSUNG				47,102	54,945		61,630	64,712		67,947		71,343		71,343			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Opini	Baik	Baik	2,917	Baik	3,066	Baik	3,790	Baik	3,980	Baik	4,179	Baik	4,388		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	197	100	408	100	238	100	250	100	262	100	275		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	CC	CC	90	CC	39	B	126	B	133	A	139	A	146		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal dan Non Formal	%	58.35	54.90	6,526	55.72	7,894	56.55	1,915	57.39	2,011	58.25	2,112	59.12	2,217		
	Rerata Hasil Post Test PKB PAUD	%	N/A	67.00		68.00		69.00		70.50		71.00		71.50			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	124.49	113.15	35,857	116.54	41,957	120.03	36,052	123.63	37,854	127.34	39,747	131.16	41,734		
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	107.22	96.19		99.08		102.04		105.10		108.25		111.49			
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB/Paket A	%	99.21	96.36		97.81		99.27		99.53		99.73		99.73			
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	83.91	80.56		81.77		83.00		84.23		85.50		86.78			
	Prosentase satuan SD yang terakreditasi	%	86	91.14		94.94		97.47		100.00		100.00		100.00			
	Prosentase satuan SMP yang terakreditasi	%	77	81.82		91.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
	Cakupan Sekolah Hijau SD (Adiwiyata)	%	N/A	27.85		74.68		87.34		100.00		100.00		100.00			
	Cakupan Sekolah Hijau SMP (Adiwiyata)	%	N/A	45.45		54.55		63.64		69.57		82.61		100.00			
	Cakupan Indikator SPM SD	%	63.46	68.35		90.00		95.00		97.00		99.00		100.00			
	Cakupan Indikator SPM SMP	%	63.46	68.35		90.00		95.00		97.00		99.00		100.00			
	Prosentase Satuan Pendidikan/SD yang sudah melaksanakan Kurikulum Pendidikan Karakter	%	N/A	0		6.33		12.66		18.99		25.32		31.65			
	Prosentase Satuan Pendidikan/SMP yang sudah melaksanakan Kurikulum Pendidikan Karakter	%	N/A	0		13.64		31.82		50.00		68.18		86.36			
	Angka Putus Sekolah SD	%	0	0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	Angka Putus Sekolah SMP	%	0	0.01		0.39		0.29		0.19		0.09		0.00			
	Angka Kelulusan SD	%	100	100		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
	Angka Kelulusan SMP	%	100	100		89.69		92.13		94.78		97.53		100.00			
	Angka Melanjutkan Siswa SD	%	99.95	98.87		98.87		99.22		99.67		99.80		100.00			
	Angka Melanjutkan Siswa SMP	%	87.89	98.99		92.68		94.68		96.58		98.33		100.00			
	Rerata Hasil Post Test PKB SD	%	N/A	64.49		65.50		67.00		70.00		70.50		71.00			
	Rerata Hasil Post Test PKB SMP	%	N/A	66.31		67.00		68.00		70.00		70.50		71.50			
Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99.15	99.25	407	99.40	367	99.55	1,044	99.69	1,096	99.84	1,151	99.99	1,209		
	Prosentase satuan PNF yang terakreditasi secara lokal	%	N/A	7.27		14.55		21.82		29.09		36.36		45.45			
	Angka Kelulusan Paket A	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
	Angka Kelulusan Paket B	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
	Angka Kelulusan Paket C	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rata-rata Hasil Post Test PKB	%	N/A		700		303		15,665		16,448		17,271		18,134		
	Rerata Hasil Post Test PKB PAUD	%	N/A	67.00		68.00		69.00		70.50		71.00		71.50			

